



**PENETAPAN**

Nomor 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON1**, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 02 September 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON2**, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 31 Desember 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw. tanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1997 di rumah Pemohon II desa Karangmulya kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, dengan berwalikan Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH /AYAH KANDUNG PEMOHON2, adapun

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa Alat Sholat dibayar tunai, yang menikahkan Petugas PPN KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH1 dan NAMA SAKSI NIKAH2;
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adalah halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan sepersusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing diberi nama :
  1. NAMAANAK1 ( Tegal, 07 Juli 1998 );
  2. NAMAANAK2 ( Tegal, 03 Pebaruari 2002 );
  3. NAMAANAK3 ( tegal, 19 September 209 );
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha mendapatkan duplikat akta nikah para pemohon ke KUA Kecamatan XXXXXX, namun tidak diketemukan /tidakada, sebagaimana surat No: XXXXXX Tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I ( PEMOHON1 ) dengan Pemohon II (PEMOHON2) yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Juli 1997 di desa XXXXXX, KecamatanXXXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah, lalu dibacakan surat permohonan itsbat nikah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon1, NIK. XXXXXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon2, NIK. XXXXXX tanggal 28 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen ( bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXX tanggal 08 April 2019 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen ( bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXX tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen ( bukti P.4);

## B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI NIKAH1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH /AYAH KANDUNG PEMOHON2 dan maharnya berupa alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama Bpk. NAMA SAKSI NIKAH1 dan Bpk. NAMA SAKSI NIKAH2 ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis dan bukan dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan ;

**2. NAMA SAKSI NIKAH2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH /AYAH KANDUNG PEMOHON2 dan maharnya berupa alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama Bpk. NAMA SAKSI NIKAH1 dan Bpk. NAMA SAKSI NIKAH2;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis dan bukan dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara penetapan nikah yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2014, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1997 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah tidak ada, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a.-----A  
danya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b.-----H  
ilangnya Akta Nikah;
- c.-----A  
danya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d.-----A  
danya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----P  
erkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan  
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku  
Kutipan Akta Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi  
kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II  
mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang  
merupakan akta otentik dimana status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan  
terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami istri dan telah lama  
membina rumah tangga serta dikaruniai 3 orang anak. Lagi pula selama ini tidak  
ada pihak lain yang memperlmasalahkan status Pemohon I dan Pemohon II  
tersebut sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman terkait dengan  
hubungan hukum perkawinan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II belum  
memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari  
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal yang menjelaskan  
bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di buku register Kantor  
Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga Pemohon I dan  
Pemohon II tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan Kutipan Akta Nikah,  
dengan demikian sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I  
dan Pemohon II mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan istbat nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan  
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,  
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai  
Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II  
sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan  
persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut  
bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-  
undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana  
diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1997 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH /AYAH KANDUNG PEMOHON2 dan dan mahar berupa alat sholat dibayar tunai, dengan saksi-saksi bernama Bpk. NAMA SAKSI NIKAH1 dan Bpk. NAMA SAKSI NIKAH2 adalah merupakan fakta yang saksi-saksi ketahui sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1982 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wadri bin Taryum dan dan mahar berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi-saksi bernama Bpk. Gayo dan Bpk. Sehad adalah merupakan fakta yang saksi-saksi ketahui sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH /AYAH KANDUNG PEMOHON2 dan mahar berupa alat sholat dibayar tunai, dengan saksi-saksi bernama Bpk. NAMA SAKSI NIKAH1 dan Bpk. NAMA SAKSI NIKAH2 ;
- bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab I'aratut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته**

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON1) dengan Pemohon II (PEMOHON2) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1997, di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at, 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH,MH. sebagai Hakim Tunggal yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor W11-A.34/2401 /HK.05/V/2019 tanggal 29 Mei 2019. dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Pupri Cahyono, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

**Drs. Ahmad Sujai, SH,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pupri Cahyono, SH.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Pemanggilan1 Pemohon I	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Pemanggilan1 Pemohon II	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 0123/Pdt.P/2019/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)